

Peranan Pemerintah Daerah Melindungi Produk Lokal Menghadapi Globalisasi

Udiyo Basuki

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
udiyobee@gmail.com

Abstrak

Globalisasi dan dampaknya bagi perekonomian bangsa khususnya pada produk dalam negeri sangat luar biasa. Impor kebutuhan hidup baik kebutuhan primer seperti makanan dan minuman maupun kebutuhan sekunder tersier seperti kosmetik dan lain-lain justru semakin meningkat. Permendag No 57 Tahun 2010 juga seakan tidak berdaya terhadap serbuan produk luar negeri. Harapannya tinggal kepada Pemerintah Daerah, namun kenyataannya, alih-alih melindungi produk lokal, Pemerintah Daerah justru melindungi kepentingan pemodal asing yang ingin menanamkan sahamnya di wilayahnya dan melupakan atau kurang memberikan perhatian terhadap produk lokal. Tulisan ini membincang bagaimana seharusnya Pemerintah Daerah berperan dalam melindungi produk lokal menghadapi globalisasi.

Kata kunci: globalisasi, pemerintah daerah, perlindungan, produk lokal

A. Pendahuluan

Globalisasi telah menjadi realita harian yang tidak dapat dihindari. Prosesnya sangat cepat dan kompleks dengan jangkauan aspek-aspek yang luas, tanpa dapat dihentikan masuk ke seluruh bidang kehidupan umat manusia. Globalisasi merupakan tatanan sosial (*order*) yang mempengaruhi perikehidupan ekonomi, politik, dan hukum suatu negara di berbagai belahan dunia akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, transportasi dan informasi, sehingga memudahkan interaksi hubungan internasional yang dilakukan oleh negara-negara maupun organisasi internasional. Istilah globalisasi pada umumnya dianggap berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan perekonomian sehingga melibatkan hubungan-hubungan global yang mengacu pada makin

menyatunya unit-unit ekonomi ke dalam satu unit ekonomi dunia.¹

Globalisasi juga ditandai dengan berbagai dorongan perusahaan transnasional, restrukturisasi ekonomi dan pengembangan perdagangan intra-regional. Mekanisme dari sistem perdagangan era global, perusahaan transnasional, lembaga-lembaga finansial dan pembangunan internasional berperan secara intensif dan dominan mendesak kesepakatan internasional yang diarahkan pada suatu negara untuk melakukan reformasi aturan dan kebijakan di segala bidang, mulai sistem perpajakan, ketenagakerjaan, perdagangan, hutang, dan investasi.²

Globalisasi merupakan suatu proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial, bahkan budaya. Globalisasi menggambarkan multi lapis dan multi dimensi proses serta fenomena hidup sebagian terbesar didorong oleh negara-negara Barat dan secara khusus kapitalis beserta nilai-nilai hidup dan pelaksanaannya.³

Globalisasi bersifat ambivalen. Dalam bidang ekonomi, ambivalensi globalisasi dapat dikatakan sebagai berkah sekaligus kutuk. Globalisasi sebagai berkah tampak dalam kemajuan ekonomi global. Contohnya, banyaknya kesepakatan perdagangan bebas yang dilaksanakan Indonesia dengan negara mitra dialog baik secara bilateral maupun regional menyebabkan tarif bea masuk preferensi semakin rendah. Saat ini rata-rata tarif bea masuk Indonesia adalah 7,73%. Rendahnya tarif ini menyebabkan maraknya produk impor masuk ke pasar dalam negeri, baik berupa produk hasil industri maupun pertanian.⁴

¹Nanang Indra Kurniawan, "Masyarakat Dunia, Globalisasi dan Nation-State", dalam Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, *Kritik Globalisasi & Neoliberalisme*, (Yogyakarta: FISIP Universitas Gadjah Mada, 2006), hlm. 36.

²Sumadi, "Relationship Marketing: Paradigma, Strategi dan Hambatan", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2 April 2012, hlm. 115.

³Dharma Setiawan Pagaralam, "Implikasi Globalisasi dan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia" *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2, No.1, Maret 2011, hlm. 23.

⁴Seiring dengan berjalannya waktu, terdapat kecenderungan kenaikan impor baik untuk produk industri maupun produk pertanian khususnya produk hortikultura. Pada tahun 2010, impor barang konsumsi mencapai USD 10 miliar, dan tahun 2011, telah mencapai USD 13,4 miliar. Walaupun impor barang konsumsi ini hanya 7,55 persen dari total impor Indonesia,

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2011, impor produk makanan dan minuman mengalami kenaikan 27,61 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu dari USD 0,404 miliar menjadi USD 0,516 miliar. Untuk produk kosmetik kenaikan terjadi sebesar 35,63 persen yaitu dari USD 0,303 miliar pada tahun 2010 naik menjadi USD 0,411 miliar pada tahun 2011. Produk pakaian jadi pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 22,33 persen dari USD 0,234 miliar menjadi USD 0,286 miliar. Adapun untuk produk alas kaki, impor pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 32,30 persen, untuk produk elektronika kenaikan impor tahun 2011 sebesar 13,34 persen dibandingkan tahun 2010. Untuk mainan anak-anak, kenaikan tahun 2011 adalah sebesar 33,02 persen.⁵

Adapun untuk produk pertanian dalam hal ini produk hortikultura⁶, juga mengalami kenaikan impor. Selama 5 tahun terakhir (2007-2011), impor produk hortikultura cenderung

namun demikian alangkah baiknya apabila hal ini dapat dipasok oleh industri di dalam negeri. Impor terbesar didominasi oleh bahan baku penolong (73,80 %) dan barang modal (18,65 %).

⁵Lihat <http://www.kemendag.go.id/> Kajian Kebijakan dalam Menanggulangi Impor/accest at 05/07/2014, Pukul 11.20 WIB.

⁶Kata hortikultura (horticulture) berasal dari Bahasa Latin yaitu 'hortus' yang berarti kebun dan 'colere' yang berarti menumbuhkan terutama sekali mikroorganisme pada suatu medium buatan. Secara harfiah, hortikultura berarti ilmu yang mempelajari pembudidayaan tanaman kebun. Akan tetapi para pakar mendefinisikan hortikultura sebagai ilmu yang mempelajari budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, bunga-bunga, dan tanaman hias. Pada umumnya, isi kebun di Indonesia adalah berupa tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman bumbu masak, tanaman obat-obatan, dan tanaman penghasil rempah-rempah. Sementara di negara maju, budidaya tanaman hortikultura sudah merupakan suatu usaha tani yang berpola komersil yakni diusahakan secara monokultur di ladang produksi yang luas. Berdasarkan jenis komoditas yang diusahakan, hortikultura dibagi atas beberapa disiplin ilmu yang lebih spesifik. Olericulture, yaitu bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari budidaya tanaman sayuran. Pomology yaitu bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari budidaya tanaman buah-buahan. Floriculture, yaitu bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari pengembangan tanaman hias Landscape horticulture, yaitu bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari pemanfaatan tanaman hortikultura, terutama tanaman hias dalam penataan lingkungan. Apiary (apikultura) yaitu bagian dari hortikultura yang mempelajari budidaya lebah madu. Lihat di <http://hortikultura.pertanian.go.id/>.

mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen per tahun. Impor produk hortikultura terbesar adalah melalui pelabuhan Tanjung Priok dengan pangsa pada tahun 2011 mencapai 64,2 persen dengan nilai USD 1.077 juta, diikuti oleh pelabuhan laut Tanjung Perak dengan pangsa 23,4 persen, Pelabuhan Belawan (5,6 %), Pelabuhan Dumai (2%), Pelabuhan Batu Ampar (1,7%) dan bandar udara Soekarno-Hatta (0,3%). Hampir sebagian besar produk Hortikultura Indonesia (47,1%) diimpor dari China. Negara asal impor produk Hortikultura Indonesia lainnya dari Thailand (12,9%), AS (8,3%), India (5,1%), dan Australia (3,2%), dimana keempat negara tersebut merupakan negara-negara mitra dagang FTA.⁷

Perkembangan laju impor produk-produk industri tersebut tidak mampu diakomodasi oleh Permendag No 57 Tahun 2010 tersebut berlaku sejak 1 Januari 2011. Dari uraian tersebut terlihat bahwa adanya Permendag tersebut belum mampu menghambat laju peningkatan impor dari produk-produk tersebut.⁸

⁷*Ibid.*

⁸Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 57/M-Dag/Per/12/2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Permendag tersebut belum mampu menghambat laju peningkatan impor dari produk-produk tersebut. Impor barang konsumsi meningkat secara signifikan. Pada tahun 2010, impor barang konsumsi mencapai USD 10 miliar, dan tahun 2011 impor barang konsumsi mencapai USD 13,4 miliar. Pangsa impor barang konsumsi sebesar 7,55 persen dari total seluruh impor Indonesia. Impor terbesar didominasi oleh bahan baku penolong (73,80 %) dan barang modal (18,65 %). Pada tahun 2011, impor produk makanan dan minuman mengalami kenaikan 27,61 persen dibandingkan tahun 2010 yaitu dari USD 0,404 miliar menjadi USD 0,516 miliar. Untuk produk kosmetik kenaikan terjadi sebesar 35,63 persen pada tahun 2011, yaitu dari USD 0,303 miliar pada tahun 2010 naik menjadi USD 0,411 miliar pada tahun 2011. Produk pakaian jadi pada tahun 2011 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 22,33 persen dari USD 0,234 miliar menjadi USD 0,286 miliar. Adapun untuk produk alas kaki, impor pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 32,30 persen, untuk produk elektronika kenaikan impor tahun 2011 sebesar 13,34 persen dibandingkan tahun 2010. Untuk mainan anak-anak, kenaikan tahun 2011 adalah sebesar 33,02 persen. Dengan demikian, Permendag Nomor 57 Tahun 2010 tersebut belum efektif untuk mengurangi laju impor produk-produk industri. Untuk memproteksi produk-produk industri lokal di pasar Dalam Negeri yang daya saingnya masih lebih rendah dibandingkan produk-produk impor, diperlukan peraturan perdagangan yang lain dalam bentuk *non tariff barriers* antara lain persyaratan sertifikat halal dan keamanan pangan untuk produk-produk

Kondisi faktual tersebut sangat memprihatinkan, mengingat peningkatan impor produk hortikultura tersebut dikhawatirkan tidak hanya mengancam kelangsungan produksi produk sejenis di dalam negeri, namun juga mengakibatkan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) eksotik yang tidak pernah ada di Indonesia, yang pada akhirnya mengakibatkan turunnya produktifitas produk hortikultura dalam negeri.

Tingginya permintaan impor akan barang konsumsi baik produk hasil industri maupun pertanian, mengakibatkan kegelisahan di kalangan produsen dalam negeri karena dapat mengganggu dan mengurangi daya saing produk lokal sejenis di pasar dalam negeri. Tentu saja apa yang diuraikan di atas bukan saja bermakna gambaran keadaan terkini yang tidak menguntungkan bagi masa depan produk lokal daerah, tetapi juga membincang peran pemerintah (daerah) yang berkepentingan langsung terhadap nasib produk lokal.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi keadaan ini adalah kurang adanya perhatian dari Pemerintah Daerah mengenai hasil produk asli daerah. Pemerintah Daerah seakan melindungi kepentingan pemodal asing yang ingin menanamkan sahamnya di wilayahnya. Selain itu, tentunya pemerintah daerah ingin mendapatkan hasil lebih dari penanaman modal asing tersebut. Dengan banyaknya modal asing masuk, berarti program pemerintah menaikkan *index perekonomian* akan tercapai dan oknum pejabat akan mendapatkan 'tambahan penghasilan' atas jerih payahnya membukakan jalan penanaman modal asing. Diperparah lagi dengan adanya otonomi daerah yang menimbulkan persaingan tidak sehat antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

Keadaan timpang ini tentunya sangat merugikan masyarakat pelaku sektor usaha. Banyak di antara mereka sudah gulung tikar dan memilih sektor jasa atau pertanian untuk mempertahankan hidup, karena sektor jasa dan pertanian dianggap usaha hidup yang lebih kecil risikonya dibandingkan sektor usaha lainnya, misalnya kerajinan.

makanan dan minuman; penerapan SNI wajib serta pemberian ijin impor yang lebih selektif. Tentunya rekomendasi dari Kementerian terkait juga harus lebih selektif.

Permasalahan yang dapat dimunculkan dari fenomena di atas adalah bagaimana seharusnya Pemerintah Daerah berperan dalam melindungi produk lokal menghadapi globalisasi. Fokus perhatiannya diarahkan pada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam melindungi produk lokal yang menjadi unggulan daerahnya. Penulisannya diilhami oleh suatu fenomena termarginalkannya produk lokal oleh serbuan produk asing.

Produk lokal menurut Sudaryatmo, seperti dikutip Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen, dapat ditentukan menurut empat acuan yaitu jika suatu produk terbuat dari bahan yang berasal dari dalam negeri, tenaga kerjanya berasal dari dalam negeri, produk tersebut menggunakan merk lokal dan terakhir kepemilikan perusahaan. Jadi, bisa disimpulkan suatu produk dapat dikatakan produk lokal jika memenuhi salah satu bahkan keempat acuan tersebut sekaligus.⁹

B. Globalisasi: Kesejagatan, Keniscayaan

Secara harfiah global berarti sedunia, sejagat.¹⁰ Kata ini selanjutnya menjadi istilah yang merujuk kepada suatu keadaan di mana antara satu negara dengan negara lain sudah menyatu. Batas teritorial, kultural, dan sebagainya sudah bukan merupakan hambatan lagi untuk melakukan penyatuan tersebut. Situasi ini tercipta berkat adanya dukungan teknologi canggih di bidang komunikasi, seperti radio, televisi, telephon, faxsimile, internet, dan sebagainya.

Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, sembari mengutip Robertson dan Giddens mengartikan globalisasi sebagai pemadatan dunia dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai satu keseluruhan atau intensifikasi relasi-relasi sosial seluruh dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa-peristiwa di satu tempat ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil jaraknya dari situ dan sebaliknya.¹¹

⁹Lihat <http://siswaspk.kemendag.go.id/lpksm/273/> Pengertian Produk Lokal/ accest at 05/07/2014, Pukul 11.20 WIB.

¹⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet XXIII, Desember 1996), hlm. 271.

¹¹ Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, "Pendahuluan", *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2006), hlm. 1.

Globalisasi sebagai kelanjutan multinasionalisasi dan transnasionalisasi telah merobohkan batas-batas kebudayaan secara meluas lebih dari sekadar melintasi batas geografis administrasi antar negara. Proses ini menjadikan manusia dengan relasi-relasi sosial budayanya sebagai *sub-human* dalam pusaran pasar global dunia. Globalisasi bahkan merupakan puncak dari kapitalisme dunia di penghujung abad ke-20 ini, yang memberikan kemungkinan besar kepada dunia kemanusiaan sebagai ter subordinasi dan terkooptasi oleh mesin kapitalisme global yang keras dan serba melintasi. Sejumlah krisis kemanusiaan diduga akan semakin *massive* dan kompleks¹².

Setidaknya ada lima dampak buruk globalisasi bagi masyarakat. *Pertama*, pengaburan batas-batas kultural dan geografis/ekologis tidak diperhatikan, sehingga kemampuan menyesuaikan diri dan daya tahan menurun, terutama bagi masyarakat atau negara lemah.

Kedua, gaya pikir akan dipengaruhi oleh produsen informasi dan penyebarannya yang dominan sehingga menimbulkan gangguan yang tidak dapat diadaptasi. *Ketiga*, hak-hak manusia yang dipropagandakan adalah versi Barat dengan bersandar pada individualisme. Hak-hak kelompok banyak terlanggar, tetapi diabaikan saja. Hak-hak manusia seringkali dikalahkan oleh hak-hak modal, sehingga globalisme dapat dianggap perang pembebasan modal.

Keempat, terancamnya demokrasi oleh globalisme. Demokrasi berarti banyak pilihan, multiopsional, tiap-tiap manusia dan negara bebas memilih yang terbaik untuk dirinya. Sedangkan globalisme mengurangi penganekaragaman di dunia yang sangat bervariasi.

Kelima, kontak budaya akan terjadi dalam skala besar, cepat, multidimensional dan serempak, sehingga tidak dapat dielakkan terjadinya peniadaan budaya, kesalahan adaptasi, dan kegoncangan budaya. Pengaruh yang mencolok terlihat dari perubahan pola hubungan antar anggota masyarakat. Masyarakat sebagai individu lebih bersikap individualistik, hedonis, dan acuh terhadap orang lain.

¹² Haedar Nashir, "Sains, Modernitas, dan Kemanusiaan", *Jurnal Inovasi*, No. 1. TH. VIII. 1998. hlm, 6.

Kelima hal di atas adalah sedikit catatan dari dampak buruk globalisasi. Globalisasi yang ditandai dengan pesatnya penemuan hal baru baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong masyarakat untuk berubah dengan cepat. Misalnya, masyarakat sekarang sudah tidak perlu lagi pergi ke pasar, supermarket atau mall untuk berbelanja. Dengan adanya (fasilitas) HP, internet dan kartu kredit seseorang dapat membeli barang-barang yang diinginkan dalam waktu singkat. Lebih lanjut, tanpa memerlukan banyak tenaga.

Melalui berbagai peralatan tersebut berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi di belahan dunia yang lain pun dapat dengan mudah diketahui bahkan diakses. Semakin banyak manusia menggunakan peralatan tersebut semakin banyak informasi yang dapat diketahui. Selanjutnya, mengingat arus informasi tersebut demikian banyak dan padat, maka tingkat kecepatan untuk mendapatkan informasi tersebut menjadi semakin tinggi.

Pada dataran empirik globalisasi berarti proses kaitan yang semakin erat dari semua aspek kehidupan, suatu gejala yang muncul dari interaksi yang semakin intensif dalam perdagangan, transaksi finansial, media dan teknologi.¹³ Globalisasi mengandung ambivalensi. Di satu sisi, proses globalisasi merupakan kesempatan besar di zaman ini yang membawa kepada perkembangan yang semakin manusiawi sampai ke pojok-pojok dunia dan memberikan keuntungan bagi semuanya. Namun di sisi lain, globalisasi melahirkan pertentangan antar manusia di muka bumi ini, yang disebabkan oleh arus penyeragaman budaya yang memaksa.¹⁴

Selain membawa dampak positif berupa peningkatan akumulasi modal, teknologi, jaringan yang semakin luas; globalisasi juga membawa dampak negatif seperti kondisi ketergantungan baik bagi individu, kelompok masyarakat maupun negara dan semakin parahnya kemiskinan yang melanda penduduk di negara-negara berkembang. Secara tajam

¹³ B. Herry Priyono, "Rakyat dalam Pusaran Globalisasi", *Kompas*, 9/08/2002, hlm. 45.

¹⁴ German Bishop's Conference Research Group on the Universal Tasks of the Church, *the Many Faces of Globalization; Perspective for Humane World Order* (Bonn: Januari 2000), hlm. 11.

dapat dirumuskan, dengan istilah lain, globalisasi merupakan gejala yang sekaligus dirayakan dan diratapi.¹⁵

Oleh karena globalisasi terkait dengan situasi konkret dan hidup mati manusia di planet bumi, maka sudah selayaknya dirumuskan suatu standar etika sosial berhadapan dengannya. Majelis Uskup Jerman, German Bishop's Conference (GBS), merumuskan dua premis menyangkut standar etika sosial tersebut. Pertama, rakyat hendaknya menjadi pusat setiap perkembangan atau pembangunan. Yang menjadi dasar premis ini adalah martabat manusia. Orientasi konkretnya, kaum miskin yang tidak mampu dan tidak punya peluang untuk ambil bagian dalam proses pembangunan.

Kedua, ekonomi, pasar, kemajuan teknologi, dan globalisasi bukan demi dirinya sendiri, melainkan merupakan sarana demi kesejahteraan hidup dan perkembangan manusia. Yang menjadi orientasi di sini adalah tanggung jawab bersama di berbagai tingkat untuk tujuan *bonum communa*, kebaikan bersama.¹⁶ Dari beberapa pengertian di atas globalisasi dapat diartikan sebagai peluang dunia usaha untuk meningkatkan sektor usahanya dan tantangan untuk tetap mempertahankan hasil produksinya agar tidak kalah bersaing dengan produk luar.

C. Produk Lokal, Birokrasi Daerah dan Globalisasi

Peluang positif globalisasi di atas menjadi kontra produktif dan menyebabkan ketimpangan ketika ia masuk dalam birokrasi pemerintahan dan menjadi lahan bisnis bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah seakan melegalkan produk asing untuk membanjiri pasaran. Keadaan ini tentunya meresahkan pelaku usaha lokal. Mereka harus bersaing dengan produk asing dan selalu berurusan dengan birokrasi pemerintah yang tidak berpihak kepadanya.

Perilaku negara (pemerintah) ini seakan menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur produksi dan distribusi barang atau jasa. Dengan demikian,

¹⁵ B. Herry Priyono, "Rakyat dalam Pusaran Globalisasi", *Kompas*, 9/08/2002.

¹⁶ GBC, *the Many Faces*, hlm. 44-45. Baca juga Agustinus Mintara, "Modal Sosial dalam Arus Globalisasi", *Basis*, Nomor 1-2, Tahun ke-52, Januari-Februari 2003, hlm. 44.

pemerintah telah melakukan program privatisasi yang pada gilirannya merugikan masyarakat lokal.

Dalam kaca mata teoritis, privatisasi merupakan pintu masuk bagi implementasi pemikiran globalisasi di ranah ekonomi. Sebab, privatisasi pada titik ini berfungsi sebagai, pertama, instrumen kebijakan yang meredusir peran negara secara sistematis dalam wilayah ekonomi. Negara, melalui kebijakan privatisasi, digerus peranannya dalam proses produksi dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat barang atau jasa. Selanjutnya, dengan alasan untuk menciptakan kestabilan pasar, negara kemudian diberi atribut sebagai regulator dalam proses transaksi ekonomi. Kedua, privatisasi merupakan instrumen yang berfungsi sebagai pembuka liberalisasi pasar secara global. Melalui privatisasi, pasar semakin terbuka dan mendorong terciptanya heterogenitas aktor dalam proses transaksi ekonomi. Akses terhadap proses transaksi ekonomi di pasar menjadi tidak terbatas dan dapat diperoleh setiap aktor, baik yang bermukim dalam wilayah lokal maupun global. Dalam konteks ini secara singkat dapat dinyatakan bahwa privatisasi menjadi sarana bagi liberalisasi pasar melalui penghapusan sekat-sekat aktivitas ekonomi yang bersumbu pada otoritas Negara secara tradisional.¹⁷

Menghadapi kondisi yang demikian pengusaha lokal harus mampu mandiri. Artinya, persaingan dalam pasar bebas yang dimotori oleh era globalisasi menjadi tantangan pengusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Keterpurukan produk yang tidak laku walaupun kualitas memadai dan buruknya dukungan pemerintah kepada pengusaha lokal.

Beberapa hal yang sekiranya perlu dilakukan oleh pengusaha lokal bangkit dan mampu menjual produknya adalah dengan, menumbuhkan *modal sosial*. Faktor utama dari modal sosial adalah manusia sebagai pribadi, sebab hanya seorang pribadi lah yang dapat membentuk modal sosial. Maka ada kaitan erat dan saling melengkapi antara modal sosial dan modal

¹⁷ Miftah Adhi Ikhsanto, "Privatisasi dan Institutionalisasi Pasar Domestik", dalam Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, *Kritik Globalisasi & Neoliberalisme*, hlm. 201-202.

manusia. Keduanya tidak bisa dipandang secara terpisah atau dipertentangkan.¹⁸

Setidaknya ada empat fungsi modal sosial, yaitu:¹⁹

1. Fungsi sosial-budaya. Modal sosial dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai yang berkembang karena arus globalisasi dengan nilai-nilai tradisional yang ada di dalam masyarakat. Selain menghambat terjadinya imperialisme budaya, modal sosial juga dapat mendukung terciptanya budaya hukum yang lebih kondusif bagi kebebasan tiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan, selain terjalinya relasi antar individu, kelompok maupun institusi di dalam masyarakat atau negara. Modal sosial juga dapat menjadi jembatan antara partikulasi dan universalitas budaya.²⁰
2. Fungsi politik. Modal sosial dapat memberikan kontribusi pada terciptanya pranata pemerintahan yang lebih demokratis, tata hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Situasi seperti ini akan lebih menjamin anggota masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus punya jaminan keamanan hidup. Terlebih di negara yang penguasa atau pemerintahannya sangat otoriter, kaum miskin dan terpinggir memiliki akses dalam proses pembangunan dan dalam *decision making*.
3. Fungsi sosial. Di dalam situasi solidaritas timbal balik dan tersedianya institusi-institusi sosial, maka akses orang-orang miskin untuk mendapatkan pelayanan sosial akan lebih mudah tercapai dan terjamin realisasinya. Modal sosial mempunyai orientasi yang memungkinkan orang merasa bertanggung jawab untuk semua. Dengan kata lain, modal sosial meningkatkan solidaritas antara pribadi satu dengan yang lainnya di dalam masyarakat demi pengembangan kebijakan, baik dalam arti ekonomi maupun sosial.²¹
4. Fungsi ekonomi. Modal sosial lebih memungkinkan interaksi yang semakin erat dalam tanggung jawab sosial yang lebih

¹⁸ GBC, *Social Capital: One Element in the Battle Against the Poverty of Society*, (Bonn, March, 2001), hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 16-20. Baca juga Agustinus Mintara, "Modal Sosial dalam Arus Globalisasi", *Basis*, Nomor 1-2, Tahun ke-52, Januari-Februari 2003, hlm. 44-45.

²⁰ GBC, *the Many Faces*, hlm. 31.

²¹ *Ibid.*, hlm. 51.

rekat. Ekonomi modern dibangun atas dasar interaksi yang kompleks, dengan pembagian kerja masing-masing orang yang melampaui batas-batas komunitas dan ikatan sosial. Interaksi modern yang didukung oleh teknologi yang semakin canggih dapat menghemat ongkos transaksi, karena tidak seperti di abad sebelumnya, transaksi di jaman modern ini telah meretas batas ruang dan waktu.²²

Dengan modal sosial seseorang akan mampu bertahan di era global. Hal ini dikarenakan, modal sosial akan mampu membawa ciri khas budaya masyarakat Indonesia yang adi luhung. Dalam berkompetisipun demikian, produk lokal yang selalu kalah saing dengan produk asing harus dipikirkan bagaimana sistem distribusi yang tepat guna. Salah satunya dengan program penjualan *door to door* atau dengan media iklan di berbagai media elektronik maupun cetak.

Kedua, peran serta dan perhatian pemerintah daerah untuk memajukan produk lokal. Pemerintah dalam hal ini negara mempunyai tanggung jawab mensejahterakan rakyatnya. Sebagaimana ada dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 33. dengan demikian, pemerintah juga harus dan mementingkan memperhatikan kelangsungan hajat hidup orang banyak.

Persoalan yang muncul sekarang ini adalah produk lokal daera yang kalah bersaing dengan produk dari luar. Hal ini dikarenakan, keengganan pemerintah daerah untuk mendukung dan memfasilitasi pengusaha lokal. Pemerintah daerah justru sibuk dengan banyak memfasilitasi pengusaha asing yang ingin menjual produknya di daerahnya.

Keadaan ini membuat sejumlah perajin atau pengusaha kewalahan menghadapi serbuan produk asing. Walaupun hasil produksi daerah lebih baik dari segi kualitas, ia kalah dengan serbuan berbagai produk dari luar dengan harga murah. Selain itu, pemerintah daerah sepertinya tidak menghiraukan dan cenderung membatasi distribusi produk dan memenuhi pasar dengan produk asing. Selain pemerintah mendapat uang lembur ia juga banyak mendapat fasilitas atas kerjanya dari pengusaha asing. Akan tetapi, di sisi lain, banyak pengusaha yang gulung tikar akibat ulah oknum pejabat pemerintah ini.

²² B Herry Priyono, "Rakyat dalam Pusaran Globalisasi", *Kompas*, 9/08/2002. hlm. 45.

Pemerintah daerah sudah saatnya keluar dari kubangan dusta. Artinya, pemerintah sudah saatnya adil dalam bersikap dan melayani masyarakat. Lebih lanjut, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk tetap mempertahankan produk lokal agar tidak banyak pengusaha gulung tikar yang pada akhirnya menambah jumlah pengangguran di daerah.

Penyederhanaan birokrasi menjadi hal yang penting dalam hal ini. Globalisasi mensyaratkan adanya birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, responsive dan akuntabel terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat. Dalam kaitan ini, untuk menciptakan suatu birokrasi atau aparatur pemerintahan menuju *good governance* dibutuhkan lima hal pokok, yaitu:

1. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik.
2. Keterbukaan atau transparansi.
3. Ketaatan pada aturan hukum.
4. Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara bukan kelompok atau pribadi.
5. Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.²³

Dalam kaitan ini, maka konsep McKinsey sebagaimana dikutip Jamaluddin Ancok,²⁴ sangat relevan untuk diterapkan dalam membangun birokrasi. Birokrasi harus memiliki nilai dalam mengembangkan visi dan misi ke depan. Visi misi birokrasi yaitu bagaimana sumber daya manusia birokrasi mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakan pembenahan terhadap birokrasi yang berkaitan dengan:

1. Strategi. Organisasi birokrasi yang semula tidak mementingkan pelayanan bagi masyarakat menjadi mengutamakan pelayanan bagi masyarakat. Bagaimana birokrasi menganggap masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik.
2. Struktur. Struktur organisasi menjadi sederhana tidak birokratik. Harus ada pemberian wewenang pada aparat

²³ World Bank, *Development in Practice Governance*, (Washington DC: The World Bank Publication, 1994), hlm. 27.

²⁴ Jamaluddin Ancok, *Revitalisasi Sumber Daya Manusia dalam Era Perubahan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Business Review, 1995), hlm. 18.

- tingkat bawah untuk mengambil keputusan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Sistem. Organisasi birokrasi harus menguasai informasi teknologi dalam pelaksanaan tugas. Penempatan pegawai dengan kompetensi yang jelas. Pegawai digaji sesuai dengan pendidikan dan prestasi yang dimiliki. Adanya penilaian kinerja secara obyektif bagi pegawai.
 4. Staf. Teknik rekrutmen pegawai harus menjaring orang yang memiliki jiwa melayani dan semangat *enterpreneurship*. Pelatihan atau training bagi staf harus dapat mendukung visi misi dari organisasi birokrasi.
 5. Skill. Bahwa skill yang dimiliki staf birokrasi harus sesuai dengan visi dan misi organisasi.
 6. Style. Kepemimpinan dalam birokrasi dan pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan visi dan misi yang ada. Pemimpin harus merasa dirinya sebagai bagian dari pelayanan, tidak bersifat otoriter, selalu memberikan bimbingan kepada bawahan dan menegakkan prinsip kebersamaan dalam birokrasi.

Pada akhirnya, produk lokal sudah saatnya dilindungi dan diselamatkan. Hal ini dikarenakan, produk lokal adalah identitas bangsa dan masa depan bangsa Indonesia. Jika produk lokal hilang dari pasaran maka yang ada adalah banyaknya pengangguran di daerah yang pada akhirnya menjadi beban Pemerintah. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab lebih dalam mengorganisir dan melindungi hak-haknya. Ketika pemerintah daerah lebih mementingkan pengusaha asing, maka akan banyak pengusaha lokal yang gulung tikar, yang pada akhirnya akan menghambat laju pertumbuhan daerah dalam pusran globalisasi.

Dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri dan memberikan perlindungan konsumen serta membantu produsen dalam negeri agar barang lokal sejenis dapat bersaing dengan barang konsumsi asal impor, maka Kementerian Pertanian diantaranya mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 89 Tahun 2011 sebagai suatu kebijakan yang mengatur tentang pelabuhan impor tertentu sebagai pintu masuk produk impor tertentu.²⁵

²⁵Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

Berdasarkan Permentan tersebut, kriteria utama dari pelabuhan yang dapat dijadikan pintu masuk impor produk industri dan hortikultura berturut-turut mulai dari yang paling prioritas adalah (1) kriteria Keamanan, Ketahanan, dan Pelayanan Pelabuhan, (2) kriteria Ketersediaan Sumberdaya Manusia, (3) kriteria Fasilitas Pelabuhan Laut, (4) kriteria Proteksi terhadap Produk Lokal, dan (5) kriteria Wilayah Perairan untuk Pelabuhan Laut.

Masing-masing kriteria utama tersebut terdiri dari beberapa sub kriteria dengan bobot/prioritas masing-masing. Hasil penentuan kriteria pelabuhan tersebut dapat dijadikan rujukan kriteria bagi pengambil keputusan untuk menentukan pelabuhan yang akan ditetapkan sebagai pintu masuk impor produk hortikultura dan industri, sebagai upaya untuk menjaga peningkatan daya saing produk lokal.

D. Penutup

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diambil diktum simpulan bahwa produk lokal sebagai bagian dari identitas bangsa dan pendukung laju ekonomi di daerah harus dilindungi dari pengaruh globalisasi, berupa masuknya produk asing yang semakin marak. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah memainkan peran yang menentukan dengan memberi berbagai fasilitas kemudahan kepada pengusaha lokal dan membatasi masuknya pengusaha asing. Hendaknya disadari bahwa masuknya produk asing dapat menyebabkan gulung tikarnya pengusaha lokal yang pada gilirannya dapat merugikan Daerah itu sendiri, misalnya maraknya pengangguran dan dapat membahayakan identitas (jati diri) daerah karena banyaknya serbuan produk asing. Komitmen yang kuat dari aparat pemerintah untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara dalam hal ini sangat diperlukan.

Wallahu'alam bishawab.

37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan/atau Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ancok, Jamaluddin, *Revitalisasi Sumber Daya Manusia dalam Era Perubahan dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Business Review, 1995.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet XXIII, Desember 1996.
- GBC, *Social Capital: One Element in the Battle Against the Poverty of Society* Bonn, March, 2001.
- German Bishop's Conference Research Group on the Universal Tasks of the Church, *The Many Faces of Globalization; Perspective for Humane World Order* Bonn: Januari 2000.
- Lili, Cosman, "Nasionalisme di Tengah Globalisasi", *Basis*, Nomor 01-02, Tahun Ke-52, Januari-Februari 2003.
- Mintara, Agustinus, "Modal Sosial dalam Arus Globalisasi", *Basis*, Nomor 1-2, Tahun ke-52, Januari-Februari 2003.
- Mugasejati, Nanang Pamuji dan Ucu Martanto (ed), *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2006.
- Nashir, Haedar, "Sains, Modernitas, dan Kemanusiaan", *Jurnal Inovasi*, No. 1. TH. VIII. 1998.
- Pagaralam, Dharma Setiawan, "Implikasi Globalisasi dan Penegakan Hukum Progresif di Indonesia" dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 2, No.1, Maret 2011.
- Priyono, B Herry, "Rakyat dalam Pusaran Globalisasi", *Kompas*, 9/08/2002.
- Sugema, Iman, "Anggaran untuk Kemiskinan dan Pengangguran", *Kompas*, 17/07/2007.
- Sumadi, "Relationship Marketing: Paradigma, Strategi dan Hambatan", dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Bandar Lampung* Vol. 2, No. 2, April 2012.
- World Bank, *Development in Practice Governance*, Washington DC: The World Bank Publication, 1994.